

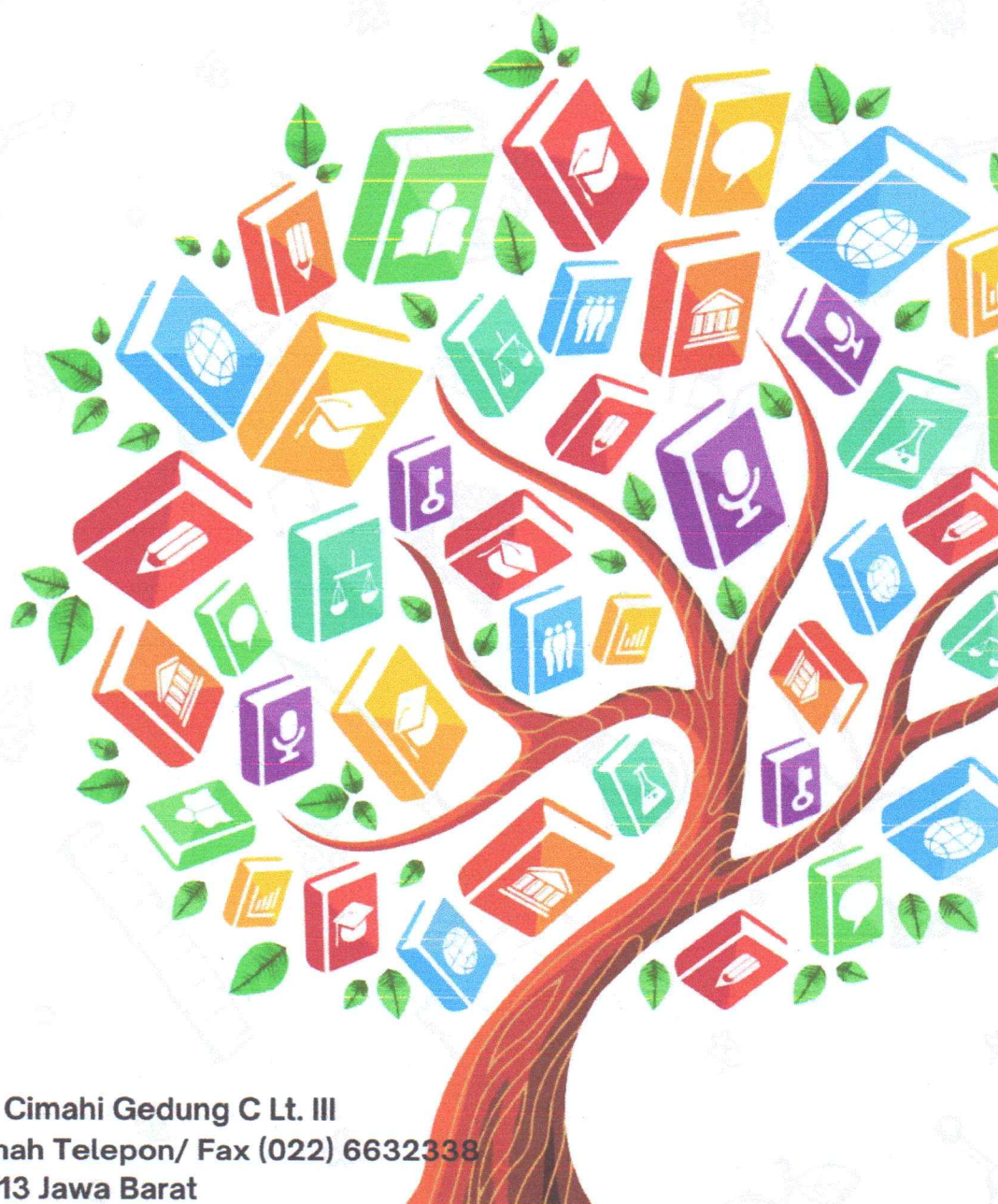


LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DP3AP2KB KOTA CIMAHI

Tahun 2023



Perkantoran Pemkot Cimahi Gedung C Lt. III

alan Rd. Demang Hardjakusumah Telepon/ Fax (022) 6632338

Cimahi 40513 Jawa Barat

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
KATA PENGANTAR	II
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. GAMBARAN UMUM DP3AP2KB	2
1.3. TUGAS DAN FUNGSI	2
1.4. ISU STRATEGIS.....	4
1.5. LANDASAN HUKUM.....	7
1.6. SISTEMATIKA.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	9
2.2. PERJANJIAN KINERJA.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1. AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1.1. CAPAIAN KINERJA	14
3.1.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	15
3.2. ANALIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	25
3.3. CROSS CUTTING PROGRAM DENGAN SKPD TERKAIT DAN INSTANSI LAINNYA.....	25
3.4. PRESTANSI, PENGHARGAAN DAN INOVASI DP3AP2KB TAHUN 2023	37
BAB III PENUTUP.....	14
4.1. PENUTUP	14

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi (DP3AP2KB) merupakan Laporan capaian Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2022. LKIP tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah kota Cimahi tahun 2023 – 2026 dan Rencana Strategis tahun 2023 - 2026 dan mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang telah disepakati antar Kepala DP3AP2KB dengan Penjabat Wali kota Cimahi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AP2KB Kota Cimahi terdapat beberapa perubahan indicator program karena harus disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019. Selain itu juga program dan kegiatan serta target kinerja harus diselaraskan dengan RPD Kota Cimahi (2023 – 2026) sehingga diharapkan nilai capaian LKIP DP3AP2KB akan lebih baik capaiannya dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan terdapat tujuh Indikator Kinerja Utama yang diampu oleh DP3AP2KB yaitu Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan, Persentase Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Ekonomi, Persentase Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Politik, Persentase Capaian Kota Layak Anak, CPR (Contraceptive Prevalence Rate) , Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan, Nilai Evaluasi RB.

Berkaitan dengan hal itu, maka berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 20 indikator program, dapat diinformasikan ketercapaian kinerja indikator sasaran sebagai berikut : 8 indikator kinerja program berhasil mencapai target kinerja 100 % , 6 Indikator kinerja program melebihi target yang ditetapkan, yang tidak tercapai target hanya 4 (tiga) indikator saja .

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2023 dianggarkan biaya sebesar Rp. 19.358.184.070,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 18.171.074.905,- atau sebesar 93,87%, terdapat efisiensi sebesar 6,13% dari efisiensi serta adanya anggaran yang tidak terserap, hal ini menunjukkan bahwa kinerja DP3AP2KB Kota Cimahi sudah cukup baik

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmatNya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) PKB) Kota Cimahi Tahun 2023, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi instansi pemerintah, pada laporan ini tergambarkan pula pencapaian indikator program secara menyeluruh disemua bidang serta penjelasan serta reasoning keberhasilan maupun ketidakberhasilan capaian indikator yang telah ditetapkan. Namun demikian intisari dari laporan ini menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi setiap perangkat daerah, para pihak yang membutuhkan dan sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program serta untuk mewujudkan upaya penyempurnaan berbagai kebijakan yang akan diambil untuk masa berikutnya.

Laporan ini terwujud karena adanya dukungan dari semua pihak yang telah membantu memberikan data pendukung masukan dan saran kritikan yang membangun, semoga dengan integritas yang kita miliki dalam menjaga eksistensi akuntabilitas DP3AP2KB Kota Cimahi akan tetap menjadi elemen positif reformasi birokrasi untuk mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Cimahi yang lebih baik , semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita dalam menjalankan semua tugas dan tanggungjawab kita.

Bandung, 31 Desember 2023
Kepala DP3AP2KB Kota Cimahi



dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi yang melaksanakan tiga urusan, yakni urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat di lingkup Kota Cimahi. Secara struktur bahwa DP3AP terdiri dari 3 Bidang dan satu Sekretariat yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, dan berdasarkan Perwalkota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi yang selanjutnya disingkat menjadi DP3AKBP2A mengampu beberapa Misi Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023 – 2026.

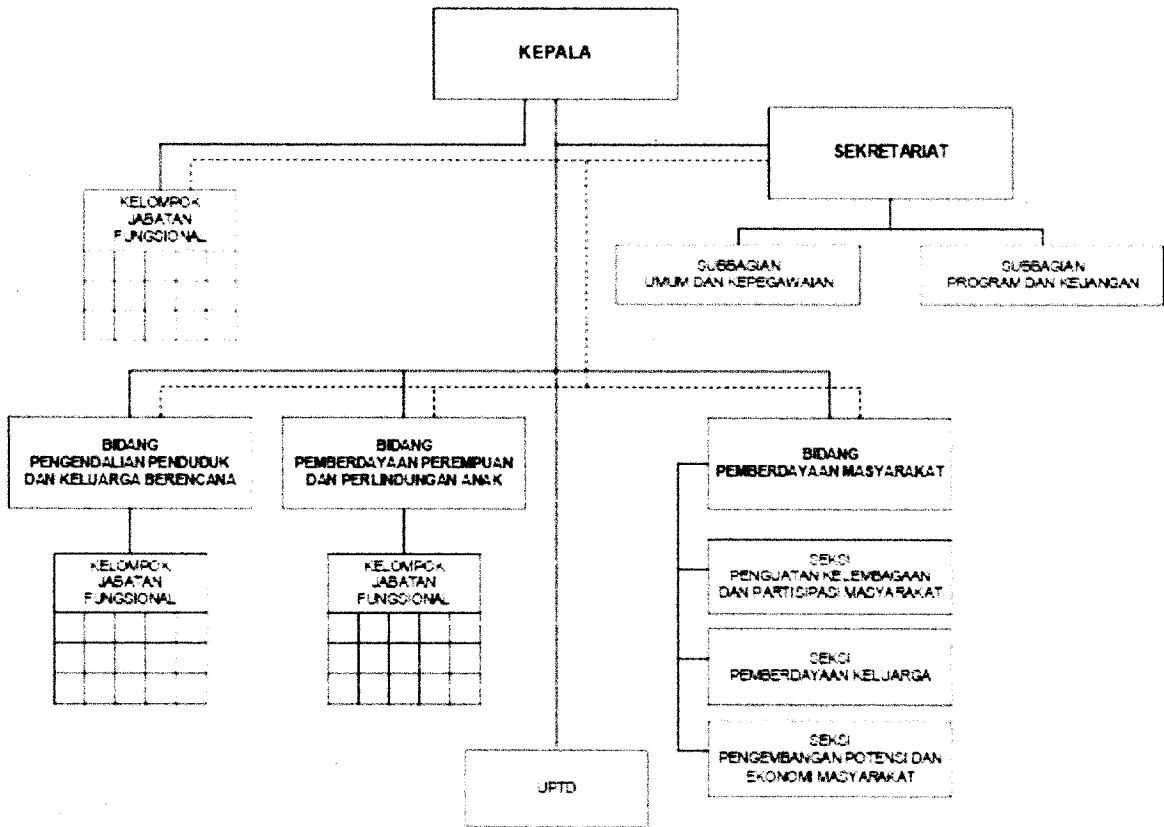
1.3 Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, dan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi. Sesuai dengan Peraturan Wali kota tersebut DP3AP2KB Kota Cimahi melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat.
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya dibantu oleh beberapa Kepala Bidang dan Pejabat struktural Lainnya sebagaimana tergambar dalam Struktur Organisasi dibawah ini :



1.4 Isu Strategis

Permasalahan-permasalahan dan Isu Strategis yang dihadapi oleh DP3AP2KB Kota Cimahi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :
 - 1) KB MKJP harus lebih digalakkan
 - 2) PIK Remaja yang sudah terbentuk harus tetap dibina pemahaman, sikap & perilakunya tentang kesehatan & hak-hak reproduksi
 - 3) Banyaknya program dan kegiatan dari Pusat (seperti Lomba lomba) yang memerlukan Biaya yang cukup tinggi dalam seremonialnya, akibatnya berkurang sumber daya baik SDM maupun anggaran untuk menggarap pemberdayaan dan peningkatan kualitas keluarga.
 - 4) masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program KKBPK, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran
 - 5) Pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum responsif gender, tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB
 - 6) Penguatan data dan Informasi kependudukan, KB ,KS.
- b. Permasalahan terkait Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
 - 1) Pembangunan yang responsif gender masih belum optimal
 - 2) Tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan sudah cukup baik, hanya tetap harus ditingkatkan kualitasnya
 - 3) Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 4) Belum terbentuknya UPTD P2TP2A sebagaimana diamanatkan oleh Permen PPPA nomor 4 tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA untuk lebih memaksimalkan peran dan fungsi P2TP2A kepada masyarakat.
- c. Permasalahan terkait Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Adapun isu-isu strategis terkait masalah Pemberdayaan Masyarakat meliputi:
 1. Kurang sinergisnya program/kegiatan pembangunan daerah berlokasi di Kelurahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat maupun dengan kabupaten/kota, masih bersifat parsial/sektoral.
 2. Kecenderungan menurunnya budaya gotong royong dalam bentuk interaksi secara langsung pada masyarakat desa dan perkotaan yang diindikasikan oleh

mulai berubahnya bentuk partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.

3. Belum optimalnya Penganggaran: CSR dan Crowdfunding untuk memberikan alternatif metode penganggaran pada program-program perdesaan melalui dana CSR dan penggalangan dana melalui jaringan internet.
4. Belum maksimalnya pengelolaan profil kelurahan sebagai bahan penyusunan perencanaan.

Tujuan Kota yang terdapat dalam dokumen RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Kota yakni terdiri dari :

1. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
4. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi;
5. Menurunnya Angka Kemiskinan
6. Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan;
7. Meningkatkan Ketahanan Bencana;

Penetapan ketujuh indikator Kinerja Utama (IKU) Kota dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penetapan IKU kota juga dilakukan untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan kota yang selanjutnya menjadi Isu Strategis Kota. selanjutnya akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang akan muncul dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), sehingga keselarasan Dokumen RPD dan Renstra Perangkat Daerah di Kota Cimahi diharapkan akan tercapai.

Untuk menyelesaikan isu strategis Kota diperlukan penetapan target indikator makro kota yang akan dicapai dalam dokumen RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Penetapan target Indikator Makro Kota Cimahi dilakukan berdasarkan trend data yang dipublikasikan BPS tentang capaian pembangunan Kota Cimahi dan hasil perhitungan proyeksi Bapelitbangda Cimahi dengan mempertimbangkan target pencapaian Indikator Makro Provinsi Jawa Barat.

Adanya perubahan lingkungan strategis seperti perubahan pemerintahan dengan segala perubahan perilaku manajemen pemerintahan negara, perubahan peraturan perundangan yang menjadi dasar penggerakan operasional program KKBPK sehingga mengubah beberapa kewenangan yang telah diserahkan ke daerah yang diatur

melalui Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 dan dijadikan lampiran Undang - undang nomor 23 tahun 2014. Perubahan lingkungan strategis antara lain, tingginya tingkat keterbukaan dan aspirasi masyarakat yang mendorong kesadaran akan pentingnya perubahan kelembagaan yang melaksanakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sesuai amanat Undang - undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Keputusan Rencana strategis DP3AP2KB Kota Cimahi. Tetap merujuk pada ketentuan dalam Undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip otonomi daerah dalam penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana merupakan langkah konkrit untuk mengatasi rentang kendali manajemen pelayanan program KB antara pemerintah dengan pemerintah daerah khususnya di Kabupaten/Kota. Hal ini tentunya dapat berjalan dengan baik apabila di dukung dengan peningkatan kualitas pelayanan pengendalian penduduk dan KB kepada masyarakat, yang diindikasikan dengan adanya keberpihakan ketersediaan infrastruktur instrumen regulasi yang mendukung penyelenggaraan program, penempatan Tenaga Penyuluh dan Pelayanan KB, rancang bangun program yang tertuang dalam Arah Kebijakan Umum Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Daerah (Renstra) yang tergambar dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah - Keluarga Berencana (RKA SKPD). Jika seluruh regulasi tersebut dapat disinkronkan secara harmonis, maka dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan program semakin baik. Terkait dengan hal - hal tersebut diatas, maka perlu segera dilakukan penyempurnaan kelembagaan BKKBN di Pusat untuk menjabarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Undang - undang nomor 23 tahun 2014. Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2018 - 2023 yang mengacu pada RPJMN 2018 - 2023 dan dijabarkan ke dalam struktur program dan anggaran melalui penetapan dan pelaksanaan program prioritas, perubahan manajemen secara berjenjang dengan penuh amanah, konsekuen dan berintegritas demi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana amanat perubahan reformasi birokrasi yang menyangkut 8 (delapan) area utama yakni (1) organisasi, (2) tatalaksana, (3) peraturan perundang undangan, (4) sumber daya manusia, (5) pengawasan, (6) akuntabilitas, (7) pelayanan publik, serta (8) monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.5 Landasan Hukum

LKIP Kota Cimahi ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor Tahun 20 tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2023 - 2026.

1.6 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2023 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Indikator Kinerja Utama

Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM). RPJPD harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya, RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD yang merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJPD dan RPJMD ketentuan harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah. RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2018, selain merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota juga harus menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mengacu pada visi dan misi yang ada dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025.

Untuk mencapai visi RPJPD tersebut ditetapkan 5 (lima) misi jangka panjang Kota Cimahi, yaitu :

1. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
3. Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah;
4. Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan;
5. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Program pembangunan daerah Kota Cimahi tahun 2023 – 2026 merupakan rangkaian upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang terpilih yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran serta langkah langkah dalam strategi pembangunan agar pencapaian visi terarah, efektif dan efisien yang selanjutnya dijabarkan oleh DP3AP2KB Kota Cimahi dalam bentuk kegiatan untuk mencapai outcome program pembangunan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran RPD Kota Cimahi.

Tabel. 2.1
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4
MISI I : MEWUJUDKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT BERAKHLAK MULIA, BERBUDAYA, MENERAPKAN ILMU DAN TEKNOLOGI, MEMILIKI JEJARING SOSIAL, PRODUKTIF DAN UNGGUL			
1	Meningkatkan Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	Pengendalian penduduk yang sesuai dengan daya tampung kota	CPR
2	Meningkatnya Pengaarusutamaan Gender	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Persentase partisipasi perempuan dalam kegiatan politik
3			Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan
4			Persentse partisipasi dalam kegiatan ekonomi
5	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
6	Meningkatkatnya Perlindungan terhadap Anak	Meningkatnya pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak dan perempuan	Persentase Capaian Kota Layak Anak
MISI II : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANGBAIK			
7	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas dan Inovasi pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DP3AP2KB

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud di atas, maka tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran beserta indikator programnya. Pada tahun 2023 target – target setiap indikator sasaran telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kepala DP3AP2KB Kota Cimahi Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya Pengarustamaan Gender	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Politik	26,67 %
	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	37,50 %
	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Ekonomi	31,65 %
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak Serta Perlindungan Khusus anak dan Perempuan	Persentase Capaian Kota Layak Anak	51 %
Pengendalian Penduduk yang Sesuai dengan Daya Tampung Kota	CPR (Contraception Prevalence Rate)	65 %
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	100 %
Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DP3AP2KB	30 Nilai

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja DP3AP2KB Kota Cimahi Tahun 2023

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B
Meningkatnya kapasitas SDM yang kompeten	Indeks Profesionalisme ASN	50,5
Terlaksananya tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	Nilai IKM Perangkat Daerah	B
Terakomodirnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	69
Meningkatnya kualitas keluarga	Cakupan keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga	100
Terpenuhinya penyediaan data gender dan anak	Persentase perangkat daerah yang memiliki data terpilah gender	70

Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	87
Meningkatnya perlindungan khusus anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	100
Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	100
Meningkatnya pengendalian penduduk	Unmeet need (Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi)	13
Meningkatnya kemandirian akseptor KB MKJP	Rasio akseptor KB MKJP	34,92
Meningkatnya pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Cakupan PUS (Pasangan Usia Subur) < 20 tahun	0,36
	Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKB	47
	Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKR	26,95
	Cakupan kepesertaan keluarga dalam BK	29,72
	Cakupan kepesertaan keluarga dalam UPPKS	0,87
	Cakupan kepesertaan keluarga dalam PIK R/M	9,12
Terpenuhinya Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Persentase Kelurahan yang terbina	100
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan	Prosentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	100

Berikut kami sampaikan rencana program dan anggaran dalam mendukung pecapaian target kinerja DP3AP2KB Kota Cimahi Tahun 2023.

Tabel 2.4
Program yang Mendukung Perjanjian Kinerja beserta Anggaran

No	Program	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 7.580.132.220,0
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp 417.908.100,00
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp 280.261.550,00

4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp 69.188.000,00
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp 199.906.650,0
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp. 125.506.250,0
6	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp 761.595.500,00
7	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp 3.257.120.750,0
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp 3.558.361,450,0
9	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp 231.656.000,0
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp 2.296.353.100,0
	JUMLAH	Rp 19.358.184.070,

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1.1 CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Cimahi selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator dan Rencana Kerja Tahun 2023. pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

3.1.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor tanggal tahun dan melalui Keputusan Walikota Cimahi Nomor ... tentang Indikator Kinerja Utama Kota Cimahi.

untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan
 Keluarga Berencana Kota Cimahi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Partisipasi perempuan dalam kegiatan politik	%	26,67	26,67	100
2	Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	%	37,50	58	155
3	Persentase Partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi	%	31,65	45	142
4	Persentase capaian Kota Layak Anak	%	51	75	147
5	CPR (Contraception Prevalence Rate)	%	65	68	105
6	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	%	100	100	100
7	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DP3AP2KB	%	30	70,15	234%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Persentase Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dengan capaian kinerja sebesar 155 %, Persentasi Partisipasi Perempuan dalam kegiatan ekonomi sebesar 142%, Persentase Capaian Kota Layak anak dengan capaian kinerja sebesar 147%, CPR (Contraception Prevalence rate) dengan capaian kinerja sebesar 105% dan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DP3AP2KB dengan capaian kinerja sebesar 234%.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Untuk Capaian Kinerja target dan Relisasi kinerja tahun 2023 dapat terlihat dari table yang disusun sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja DP3AP2KBA Kota Cimahi Tahun 2023

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3		
Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B	BB	BB
Meningkatnya kapasitas SDM yang kompeten	Indeks Profesionalisme ASN	50	64,5	129 %
Terlaksananya tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	Nilai IKM Perangkat Daerah	B	B	B
Terakomodirnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	69	58	84%
Meningkatnya kualitas keluarga	Cakupan keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga	100	100	100 %
Terpenuhinya penyediaan data gender dan anak	Persentase perangkat daerah yang memiliki data terpilah gender	70	80	114%
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	87	92,2	106%
Meningkatnya perlindungan khusus anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	100	100	100%
Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	100	100	100%

Terpenuhinya Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Persentase Kelurahan yang terbina	100	56%	56%
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan	Prosentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	100	100	100%
Menigkatnya pengendalian penduduk	Rata rata jumlah anak /keluarga	2,3	2,3	100%
Menigkatnya pengendalian penduduk	Unmeet need (Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi)	13	12,7	102 %
Meningkatnya kemandirian akseptor KB MKJP	Rasio akseptor KB MKJP	34,92	37,4	107 %
Meningkatnya pemberdayaan dan penigkatan keluarga sejahtera	Cakupan PUS (Pasangan Usia Subur) < 20 tahun	0,36	0,3	117%
	Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKB	47	34,8	78 %
	Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKR	26,95	41,1	152 %
	Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKL	29,72	47,7	160%
	Cakupan kepesertaan keluarga dalam UPPKA	0,87	0,23	26 %
	Cakupan kepesertaan keluarga dalam PIK R/M	9,12	8,3	91 %

3.1.3 Realisasi Analisis Kinerja Dan Capaian Kinerja 2023

Sasaran 2.1.
Meningkatnya Nilai SAKIP

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
Nilai Sakip Perangkat Daerah	-	-	-	B	BB	BB	B	BB	BB

Untuk indikator kinerja pertama yakni Meningkatnya nilai SAKIP DP3AP2KB Kota Cimahi capaian kinerja yang diperoleh adalah BB dari target yang ditetapkan yaitu B . Hal ini bisa terwujud karena adanya tindak lanjut dari hasil TLHP dan Review dari Inspektorat sehingga kita bisa memperbaiki apa yang kurang dan yang harus dilengkapi dalam pemenuhan nilai SAKIP ditahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa DP3AP2KB dapat bekerja lebih maksimal serta mengerahkan semua sumber daya demi perbaikan Nilai SAKIP dan hal ini menunjukkan capaian kinerja DP3AP2KB lebih baik lagi.

Sasaran 2.2.
Meningkatnya Kapasitas SDM Yang Kompeten

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
Indeks Profesionalisme ASN	-	-	-		-	-	50	64,5	129%

Indikator kinerja yang kedua adalah Indeks Profesionalisme ASN yang ditargetkan sebesar

50% ternyata capaian kinerja indikator ini adalah 64,5% dan capaian kerjanya sebesar 129% hal ini menunjukan kinerja DP3AP2KB Kota Cimahi tentang Profesionalisme Pegawai sudah sangat bagus, capaian kinerja ini didukung oleh adanya pegawai yang sudah menyelesaikan pendidikan kesetaraan misalnya dari lulusan SMA menjadi lulusan S1 serta banyaknya pegawai yang mengikuti bimbingan teknis dari kementerian atau urusan yang diampu oleh DP3AP2KB dan adanya beberapa pegawai yang mengikuti Diklat Kepemimpinan.

Sasaran 2.3.
Terlaksananya tata kelola administrasi pemerintahan yang baik

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
Nilai IKM Perangkat Daerah	-	-	-	B	BB	BB	B	B	B

Indikator kinerja untuk sasaran strategis berikutnya adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Nilai ini daritahun pertama DP3AP2KB berdiri selalu naik . Indeks inibisa dicapai karena adanya survey yang dilakukan atas pelayanan publik yang diberikan oleh DP3AP2KB Kota Cimahi yaitu pelayanan KB bergerak yang diberikan untuk masyarakat Kota Cimahi. Dari hasil survey yang dilakukan dapat terlihat adanya kepuasan dari masyarakat yang diberi layanan.

Sasaran 2.4.
Terakomodirnya partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	-	-	-	33 %	60,65%	183%	69%	58%	84%

Indikator kinerja berikutnya yang dievaluasi adalah Persentase partisipasi perempuan di

lembaga pemerintah. Indikator Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah ditargetkan sebesar 69% pada tahun 2023 tercapai sebesar 58% dengan capaian kinerja sebesar 84%. hasil ini diperoleh dengan cara menghitung jumlah ASN perempuan dibagi jumlah keseluruhan jumlah ASN yang ada di Pemkot Cimahi. Indikator ini tidak tercapai karena banyaknya ASN/PNS perempuan yang semula menduduki jabatan structural menjadi jabatan fungsioanal penyetaraan, bukan berartipartisipasi perempuan di lembaga pemerintah menurun hanya saja terjadi perubahan status dari yang semula jabatan structural dengan kewenangan yang luas dan berbeda dari jumlah ASN biasa menjadi jabatan fungsional penyetaraan berdasarkan perundang undangan yang berlaku.

Sasaran 2.5.
Meningkatnya Kualitas Keluarga

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
Cakupan Keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator selanjutnya yang dievaluasi adalah persentase keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga, realisasi kinerja indikator ini tercapai 100% dari target 100%. Perlu kami informasikan bahwa Program dan kegiatan ini mempunyai sasaran 100 Keluarga binaan di Lokasi P2WKSS Lokasi untuk Program ini setiap tahun selalu berpindah dari satu kelurahan ke kelurahan lain, dan kriteria lokus yang ditentukan juga dengan indicator yang memang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yang sesuai dengan yang sudah ditentukan , dimana lokasinya harus di tempat yang memerlukan program tersebut, dengan harapan apabila 100 KK Binaan yang ditentukan tersebut telah mendapatkan pembinaan, pemberian pengetahuan dan wawasan tentang berbagai macam pelatihan, modul modul dari para fasilitator harapannya dapat meningkatkan perekonomian serta menambah keterampilan yang dapat meningkatkan dan menambah pendapatan sehingga pada akhirnya dapat

meningkatkan tarap hidup serta kesejahteraan bagi mereka.

Sasaran 2.6.
Terpenuhinya penyediaan data Gender dan Anak

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
Persentase Perangkat daerah yang memiliki data terpilah gender	-	-	-	-	-	-	70%	80%	114%

Indikator kinerja persentase perangkat daerah yang memiliki data terpilah gender mempunyai taget sebesar 70% dan yang diperoleh sebesar 80% maka capaian kinerja untuk indicator ini adalah sebesar 114 %, hal ini menunjukan bahwa OPD yang ada Pemkot Cimahi telah mampu untuk bisa memilah data gender, hal ini sangat penting untuk dapat menentukan jumlah kebutuhan perencanaan dan sasaran yang ditentukan sehingga perencana pembangunan benar benar sesuai kebutuhan.

Sasaran 2.7
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	87%	89,%	102%	90%	97%	107%	87%	92,2%	106%

Indikator Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar mempunyai target 87% , indikator ini hanya dihitung dari ketiga kebutuhan dasar anak yang harus dilayani yaitu kebutuhan pendidikan dasar (SD, SMP), Imunisasi dasar dan status kependudukan anak di Kota Cimahi dengan hasil ketercapaian sebesar 106%, ini menunjukan bahwa Pemerintah Kota Cimahi

senantiasa hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya terlebih kebutuhan dasar anak sebagai generasi penerus bangsa.

Sasaran 2.8
Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
Persentase anak korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Persentase anak korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu ditargetkan 100% dan tercapai 100% artinya semua pengaduan tindak kekerasan terhadap anak yang diterima oleh P2TP2A Kota Cimahi selalu diselesaikan dan tertangani seluruhnya. Penanganan dan pelayanan yang diberikan tidak saja pada pendampingan psycologis, pendampingan psyco sosial akan tetapi sampai pada tahapan pendapingan hukum dan medis juga. Selama tahun 2023 terdapat 28 Kasus terhadap anak diantaranya 16 kasus terhadap anak laki laki dan 12 kasus terhadap anak perempuan.

Tindak kekerasan terhadap anak setiap tahun selalu mengalami peningkatan, hal ini bisa terjadi karena banyak factor dan kemungkinan besar mengapa mengalami peningkatan karena adanya kemauan dan keberanian dari masyarakat ataupun korban tindak kekerasan yang berani melapor serta adanya kemudahan akses pelaporan. Namun belum sepenuhnya dilaporkan, mungkin saja masih terdapat kasus kasus tindak kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan karena dianggap aib keluarga. Namun Pemerintah Kota Cimahi melalui DP3AP2KB akan senantiasa memberikan pelayanan yang optimal terhadap penanganan kasus kasus tersebut.

Sasaran 2.9
Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
Peresentase perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sama halnya dengan penanganan kasus terhadap kekerasan kepada anak, bahwa perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan akan selalu mendapatkan penanganan yang terpadu sampai kasus tersebut selesai. Tahun 2023 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi sebanyak 33 kasus yang ditangani oleh P2TP2A. Selama kasus tersebut berjalan DP3AP2KB melalui P2TP2A memberikan pelayanan perlindungan terhadap korban perempuan baik berupa penanganan psyhis, penangan medis dan keamanan bagi korban tersebut serta memberikan pendampingan hukum serta home visit untuk menggali lebih dalam dan mencari informasi yang luas baik terhadap korban maupun informasi dari lingkungan sekitarnya. Indikator ini ditargetkan 100 % dan realisasinya 100% sehingga capaian kinerjanya 100% artinya bahwa semua pengaduan dari perempuan yang menjadi korban kekerasan ditangani oleh Pemerintah Kota Cimahi melalui DP3AP2KB .

Sasaran 2.10
Terpenuhinya Administrasi Pemerintahan Kelurahan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
Persentase Kelurahan yang tebina	-	-	-	100%	100%	100%	100%	56%	56%

Untuk Indikator Persentase Kelurahan yang terbina mempunyai target sebesar 100% dan realisasi sebesar 56% sehingga capaian kinerja yang diperoleh 56%%. Bahwa setiap kelurahan yang ada di Kota Cimahi yang berjumlah sebanyak 15 Kelurahan selalu mendapat pembinaan dari DP3AP2KB melalui kegiatan sosialisasi Prodeskel (Profil Desa/Kelurahan) yang bertujuan untuk memberikan informasi dan cara cara penginputan berbagai data terkait dengan kewilayahan, geografis, ekonomi, kependudukan dan yang lainnya sebanyak 127 indikator inputan sesuai dengan PP nomor 7 tahun 2015 yang harus dilakukan oleh Kelurahan dan data hasil inputan tersebut langsung terkoneksi ke Pusat. Masalah yang dihadapi oleh sebagian besar kelurahan adalah kurangnya SDM yang menginput sehingga sering terjadinya keterlambatan atau bahkan tidak dilakukannya penginputan oleh kelurahan. Hal ini berdampak kepada rendahnya capaian kinerja, dari 15 Kelurahan baru sekitar 8 Kelurahan yang bias melakukaan input secara tuntas, dan 7 kelurahan yang lain masih berproses sehingga laporan akhir yang dapat kami hitung utuk capaian kinerja ini masih 56%. Bahw DP3AP2KB harus berupaya lebih keras lagi membangun koordinasi dengan semua kelurahan, memberikan saran untuk penambahan SDM di kelurahan dan memberikan sosialisasi lebih inten agar semua kelurahan dapat menyelesaikan Profil kelurahan masing masing.

Hasil inputan yang seharusnya dilakukan oleh seluruh kelurahan dan outputnya berupa Profil kelurahan akan menjelaskan apakah kelurahan tersebut berkembang, belum berkembang atau bahkan cepat berkembang. Profil tersebut dapat dijadikan bahan sebagai syarat agar Kelurahan tersebut dapat diikutsertakan pada lomba kelurahan baik di tingkat Kota Propinsi atau Nasional.

Sasaran 2.11
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan aktif	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator kinerja Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan aktif targetnya 100% dan realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya 100%. Lembaga kemasyarakatan yang yang difasilitasi dan diampu oleh DP3AP2KB terdiri dari PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPM serta RW dan RT. Keseluruhan lembaga tersebut berperan cukup aktif dalam berbagai kegiatan yang ada di DP3AP2KB Kota Cimahi, artinya bahwa kelembagaan tersebut berdaya dan berperan aktif dalam segala hal kegiatan yang ada kaitannya dengan kemasyarakatan sesuai dengan tugas fungsi kelembagaan termaksud.

Sasaran 2.11
Meningkatnya Pengendalian Penduduk

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
Rata rata jumlah anak per keluarga	-	-	-	2,3	2,3	100%	2,3	2,3	100%

Indikator kinerja berikutnya yang dievaluasi adalah rata rata jumlah anak per keluarga yang tercapai 100%. Ini menunjukan bahwa pasangan usia subur yang ada di Kota Cimahi rata rata mempunyai anak antara 2 sampai 3 orang, hal tersebut menunjukan semakin sadarnya masyarakat untuk membatasi jumlah anak dalam keluarga mereka demi mewujudkan keluarga sejahtera. Petugas lini lapangan bisa berbangga dengan capaian indikator ini.

Sasaran 2.12
Meningkatnya Pengendalian Penduduk

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
Unmeet need (Persentase kebutuhan ber-KB)	-	-	-	9%	13,86%	65%	13%	12,7%	102%

Indikator Unmeet Need (Persentase kebutuhan ber-KB) mempunyai target 13% dan realisasinya sebesar : 12,7% capain kinerja tahun 2023 sebesar 102% % Keberhasilan capaian kinerja ini membuktikan bahwa kebutuhan ber KB masyarakat yang tidak terlayani sudah dapat terpenuhi. Hal

ini berkat kerja keras Bidang Pengendalian Penduduk dan KB melalui berbagai kegiatan dan sub kegiatan diantaranya pelayanan KB bergerak serta adanya kerjasama anatar DP3AP2KB dengan pusat pusat fasilitas kesehatan yang ada di Kota Cimahi serta berdampaknya kegiatan Konseling, Informasi dan Edukasi kepada sasaran KB serta pasangan usia subur yang tidak ber-KB.

Sasaran 2.13
Meningkatnya kemandirian akseptor KB MKJP

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
Rasio akseptor KB MKJP	-	-	-	-	-	-	34,92 %	37,4%	107%

Indikator rasio akseptor KB MKJP ditargetkan sebesar 34,92% dengan realisasi sebesar 37,4% dengan capaian kinerja sebesar 107% indicator ini merupakan indicator yang baru yang menjadi sasaran program KB ini menunjukan bahwa pasangan usia subur yang ber KB sudah cukup banyak yang beralih cara KB dari Pil/kondom atau kontrasepsi jangka pendek ke pemakaian kontrasepsi jangka panjang ini mereka lakukan untuk menghindari resiko yang mungkin akan terjadi pada Pasangan Usia Subur yang ber KB apabila mereka belum menggunakan cara berKB MKJP, serta keberhasilan para Lini lapangan atau Penyuluh KB dan Teladan KB dalam meyakinkan PUS untuk menggunakan Kontrasepsi MKJP.

Sasaran 2.14
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
Cakupan PUS (Pasangan Usia Subur) < 20 Tahun	-	-	-	0,65 %	0,74 %	88%	0,36%	0,3%	117%

Indikator kinerja berikutnya yang dievaluasi adalah Cakupan Pasangan Usia subur < 20 Tahun dengan realisasi sebesar 0,3 % dengan capaian kinerja sebesar 117% ini menunjukan bahwa di Kota Cimahi Pasangan Usia Subur yang dibawah 20 tahun yang menikah mengalami penurunan artinya bahwa di Kota Cimahi usia ideal untuk perkawinan sudah diatas 20 tahun. Ini menunjukan

keberhasilan program KB melalui bebrbagai kegiatan yang dilakukan DP3AP2KB dengan bidang P2KB sudah cukup berhasil dengan dukungan Teladan KB, Penyuluh Lapangan KB serta bantuan para Kader dilapangan melaluim KIE.

Sasaran 2.15
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKB	-	-	-	12,39%	58,07%	468%	47%	34,8%	78,29%

Indikator kinerja cakupan kepesertaan keluarga dalam BKB merupakan indikator baru yang harus dievaluasi dan hasil kinerja diperoleh sebesar 34% dari target 47% dengan capaian kinerja sebesar 78,29 % angka ini diperoleh dari jumlah anggota yang hadir di pertemuan dibagi jumlah keluarga anggota BKB dari jumlah Kader pendamping sebanyak 1314 dan jumlah anggota keluarga BKB sebanyak 3772 . Hal ini menunjukkan bahwa keluarga yang mempunyai Balita lebih sedikit hadir dipertemuan kelompok karena ibu ibu muda lebih mempunyai akses yang luas melalui media social untuk mencari informasi dan parenting pengasuhan balita mereka, terkait pola asuh anak dan sebagainya.

Sasaran 2.16
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKR	-	-	-	14,46 %	36,17 %	250 %	26,95 %	41,1%	152%

Indikator kinerja Cakupan Kepesertaan keluarga dalam BKR atau Bina Keluarga Remaja

dengan target sebesar 26,95 % tercapai sebesar 41,1% jadi capaian kinerja sebesar 152% capain ini menunjukan berhasilnya KIE (Konseling, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh DP3AP2KBA Kota Cimahi terhadap sasaran keluarga yang mempunyai remaja serta tingginya minat remaja Kota Cimahi untuk hadir dipertemuan kelompok untuk mendapatkan berbagai informasi .

Sasaran 2.17
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKL	-	-	-	11,66 %	57,37 %	402 %	29,72%	47,7%	160%

Cakupan Kepesertaan keluarga dalam BKL atau Bina Keluarga Lansia dengan target sebesar 29,72% tercapai sebesar 47,7% capaian kinerja sebesar 160% capain ini menunjukan berhasilnya KIE yang dilakukan oleh DP3AP2KB serta tingginya minat para lansia untuk bergabung di kelompok BKL untuk mendapatkan berbagai layanan kesehatan misalnya cek tensi darah secara gratis, serta layanan lain dan informasi terkait kesehatan dan akatifitas lansia lainnya yang diperoleh di Kelompok BKL juga peran serta para kader dan petugas lini lapangan dalam memberikan KIE (Konseling, Informasi dan Edukasi) dengan sasaran usia lanjut usia yang dilakukan oleh DP3AP2KBA Kota Cimahi.

Sasaran 2.18
Meningkatnya cakupan kepesertaan keluarga dalam UPPKA

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
Cakupan kepesertaan keluarga dalam UPPKA	0,37%	2,17%	586%	0,38%	0,59%	155%	0,87	0,23	26%

Indikator kinerja Cakupan Kepesertaan keluarga dalam UPPKA mempunyai target 0,87% dengan realisasi sebesar 0,23 % sehingga capaian kinerja sebesar 26 %, ketercapaian indikator ini tidak memenuhi capaian target kinerja karena banyaknya UPPKA yang naik kelas menjadi anggota UMKM di lingkungannya ini merupakan bentuk keberhasilan pembinaan dan pelaksanaan program pembinaan keluarga yang dilakukan oleh DP3AP2KB didukung oleh banyak faktor terlebih dimasa pandemic setiap keluarga akan berusaha untuk bertahan hidup dan menaikkan pendapatan keluarga dengan berbagai cara tanpa harus keluar rumah (juala on line) peran media sosial dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan keluarga, serta optimalnya pelaksanaan KIE kepada masyarakat.

Sasaran 2.19
Meningkatnya cakupan kepesertaan keluarga dalm PIK R/M

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
Cakupan kepesertaan keluarga dalam PIK R/M	-	-	-	1,26%	8,64%	685	9,12%	8,3%	91%

Indikator kinerja Cakupan Kepesertaan keluarga dalam PIK R/M (Pusat Informasi Keluarga Remaja dan Mahasiswa) hanya tercapai 8,3% dari target sebesar 9,12% dengan capaian kinerja sebesar 91% hal ini tidak memenuhi capaian kinerja dikarenakan mahasiswa sudah kembali beraktifitas dikampus masing masing pasca pandemic dan banyak melakukan kegiatan dan berkegiatan dikampus, serta para mahasiswa dapat dengan mudah mengakses berbagai macam kegiaian dan informasi melalui media social yang mereka miliki.

Realisasi Tahun 2023 Dengan Target RPDdan RENSTRA 2023 -2026

Indikator	Target RPD 2023	Target Renstra Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
Nilai Sakip Perangkat Daerah	B	100 %	BB	BB
Indeks Profesionalisme	50	100 %	64,5	129%

ASN				
Nilai IKM Perangkat Daerah	B	B	B	B
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	69	69%	58%	84%
Cakupan keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga	100	80 %	100	100 %
Persentase perangkat daerah yang memiliki data terpilah gender	70	2,3	80	114%
Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	87	87	92%	106%
Persentase anak korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	100	0,65%	100	100%
Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	100	100%	100%	100%
Persentase Kelurahan yang terbina	100	100%	56%	56%
Prosentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	100	11,66%	100	100%
Rata rata jumlah anak /keluarga	2,3	2,3	2,3	100%
Unmeet need (Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi)	13	13	12,7	102%

Rasio akseptor KB MKJP	34,92	34%	37,4%	107%
Cakupan PUS (Pasangan Usia Subur) < 20 tahun	0,36	0,36%	0,3 %	117%
Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKB	47	47%	34,8%	74,04%
Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKR	26,95	26,95%	41,1%	152%
Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKL	29,72%	29,72%	47,7%	160%
Cakupan kepesertaan keluarga dalam UPPKS	0,87%	0,87%	0,23%	26%
Cakupan kepesertaan keluarga dalam PIK R/M	9,12%	9,12%	8,3%	91%

3.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Keberhasilan program dan kegiatan dalam rangka mencapai indikator kinerja utama akan sangat dipengaruhi oleh daya dukung sumber daya yang dimiliki oleh sebuah organisasi, baik itu sumber daya manusia, sumber dan anggaran, sumber daya sarana dan prasarana, sumber daya kemitraan.

Sumber Daya yang dimiliki oleh DP3AP2KBA Kota Cimahi tahun 2022 meliputi :

- **Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia yang mendukung keberlangsungan dan pelaksanaan Program dan Kegiatan saat ini terdiri dari :

- A S N : 32 Orang
- THL APBD : 8 Orang
- THL Propinsi : 1 Orang

Sumber Daya Anggaran dan pembiayaan

Sumber dana yang dimiliki selain dari APBD juga dana yang diperoleh dari DAK, Bantuan Gubernur (Tentatif) juga dana dari BAZNAS Kota Cimahi ataupun sumbangan perorangan (untuk kegiatan sosial)

- Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana yang dimiliki meliputi : Gedung dan Kendaraan Operasional

Gedung terdiri dari 5 Bangunan terdiri dari :

- a. Gedung kantor DP3AP2KB
- b. Gedung Balai Penyuluh KB
- c. Gudang Alat Kontrasepsi
- d. Gedung Sekretariat P2TP2A
- e. Gudang Arsip

Untuk beberapa sarana yang dimiliki seperti Gedung Sekretariat P2TP2A, , Gudang Arsip, statusnya masih sewa kepada pihak lain ini menunjukkan bahwa DP3AP2KBA akan senantiasa berupaya maksimal menggunakan sumber daya yang ada untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

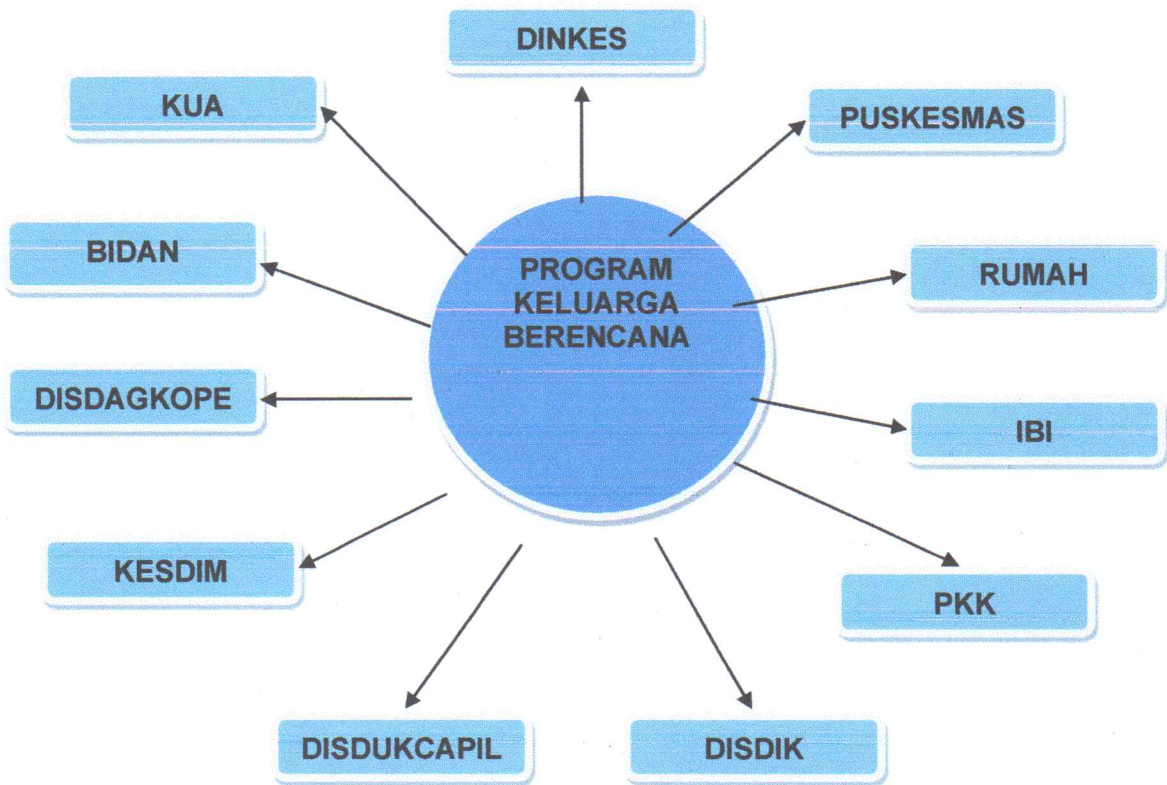
- Sarana transportasi (Kendaraan Operasional)

Sarana kendaraan operasional yang dimiliki oleh DP3AP2KBA Kota Cimahi :

- Kendaraan Akseptor KB satu unit
- Kendaraan Mobil Perlindungan (MOLIN) satu unit
- Kendaraan /Mobil Penerangan (Mupen KB) satu unit
- Kendaraan Mobil BOX Untuk Distribusi Alkon satu unit
- Kendaraan Roda dua sebanyak 9 Unit

3.3 Cross Cutting Program Dengan SKPD Terkait Dan Instansi Lainnya

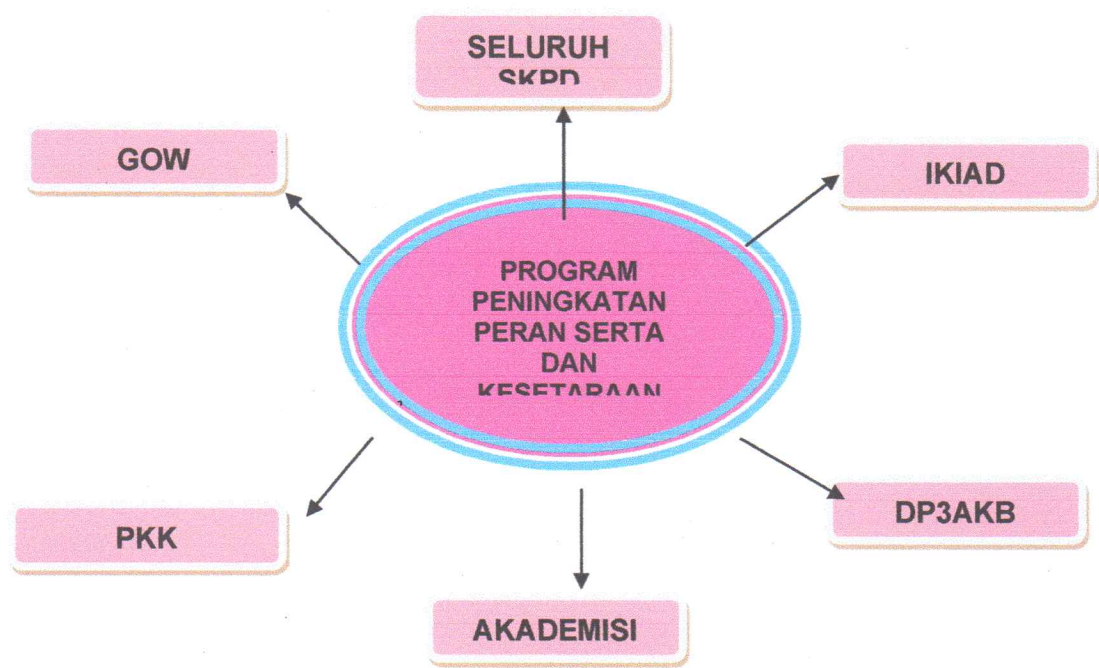
1) CROSS CUTTING PROGRAM KELUARGA BERENCANA



2) CROSS CUTTING PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT



3) CROSS CUTTING PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN



4) CROSS CUTTING PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK



5) CROSS CUTTING PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARTUR



6) CROSS CUTTING PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR



7) **CROSS CUTTING PENINGKATAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**



3.4 Prestasi, Penghargaan dan Inovasi DP3AP2KBA Tahun 2023

- Kota Terbaik ke 2 Tingkat Nasional dalam melaksanakan Praktik baik audit kasus stunting
- Juara ke 3 Tingkat Nasional Pada Lomba Poster Competition Pelaksana Audit kasus stunting
- Juara 1 Lomba Genre Puteri Tingkat Propinsi Jawa Barat
- Juara 2 SSK Tingkat Propinsi Jawa Barat
- Pelaksana audit kasus stunting terbaik 1 Tingkat Prpropinsi Jawa Barat
- Juara 3 Katagori Capaian KB MKJP 200 – 500 Tingkat Kab/Kota Nasional
- Juara ke 2 Lomba Kelurahan Tingkat Propinsi Jawa barat
- Juara Harapan 1 Lomba Posyandu Tk. Propinsi Jawa Barat

- Juara 3 gagah Bencana Tk. Propinsi Jawa Barat
- Juara Harapan 1 P2WKSS Tk. Propinsi Jawa Barat
- Meraih Anugrah Parahyta Ekapraya Katagori Pratama Tingkat Nasional
- Fasilitator terbaik Sekoper Cinta Tk. Prpinsi Jawa Barat
- Kader Sekoper Cinta terbaik se Propinsi Jawa barat

BAB IV PENUTUP

4.1 Penutup

Pada bagian penutup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DP3AP2KBA Kota Cimahi Tahun 2023 ini, dapat Kami simpulkan bahwa DP3AP2KBA Kota Cimahi secara umum mempunyai 3 (tiga) Tujuan, 7 Sasaran Strategis, 7 Indikator Kinerja Utama dan 20 (dua puluh) indikator kinerja program.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk mengukur capaian kinerja indikator sasaran dan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berkaitan dengan hal itu, maka berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 20 indikator program, dapat diinformasikan ketercapaian kinerja indikator sasaran sebagai berikut : 7 indikator kinerja program berhasil mencapai target kinerja 100 %, 9 indikator kinerja program berhasil melampaui target yang ditetapkan yakni, Nilai SAKIP Perangkat daerah (BB) , indikator Indeks Profesionalisme pegawai 129 %, Persentase perangkat daerah yang memiliki data terpadu gender dengan capaian 114%, Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar sebesar 106%, Rasio Akseptor KB MKJP sebesar 107%, un met need (Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi) sebesar 102%, Cakupan PUS 20 tahun sebesar 117%, Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKR sebesar 152%, Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKL sebesar 160%, Terdapat 5 (lima) indikator yang tidak tercapai yaitu Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah sebesar 84%, Persentase kelurahan yang terbina sebesar 56%, Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKB sebesar 78%, Cakupan kepesertaan keluarga dalam UPPKA sebesar 26%, Cakupan kepesertaan PIK/R M sebesar 91%, sedangkan yang mencapai 100% sebanyak 6 indikator yaitu indikator Persentase anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan terpadu, persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu, persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif, dan rata rata jumlah anak dalam keluarga serta Nilai IKM perangkat daerah.

Permasalahan yang dihadapi oleh DP3AP2KB Kota Cimahi cukup banyak, selain keterbatasan anggaran dan dana juga keterbatasan Sumber Daya Manusia dan sarana pendukung, tidak tersedianya rumah aman bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, belum terbentuknya UPT PPA yang seharusnya sudah terbentuk di setiap kabupaten /Kota. Permasalahan lain yang harus dibenahi adalah tempat kerja yang tidak sesuai dengan daya tampung pegawai dan berakibat pada ketidaknyamanan dalam bekerja.

Idealnya DP3AP2KB selaku organisasi perangkat daerah yang mempunyai

tugas pokok dan fungsi serta urusan pemerintahan yang banyak mempunyai sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan kebutuhan pegawai, akan tetapi DP3AP2KB akan tetap berusaha maksimal memenuhi target kinerja yang ditetapkan sebagai tujuan demi memenuhi semua target Indikator Kinerja Utama serta indikator program yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat Kota Cimahi dapat hidup dengan baik dan nyaman , perempuan berdaya, anak terlindungi, keluarga terencana menuju Cimahi yang sejahtera dan bahagia.